



Banjarmasin
A Thcusa.-d Ri'ers Cit' /

RENJA PERUBAHAN

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 telah selesai disusun.

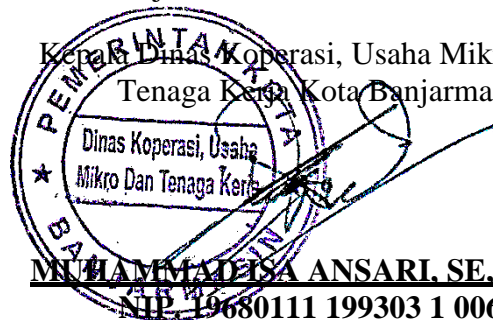
Perubahan ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada awal tahun sampai dengan triwulan ke-II di tahun ini. Disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2022.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini.

Semoga Rancangan Akhir Renja Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam penyusunan RKPD Kota Banjarmasin.

Banjarmasin, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.AP.
NIP. 19680111 199303 1 006



| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Sistematika Perubahan Renja SKPD..... | 3 |
| 1.4 Maksud Dan Tujuan | 4 |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN | 5 |
| A. Program Pelayananan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..... | 5 |
| B. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi..... | 8 |
| C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian..... | 9 |
| D. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 10 |
| E. Program Pemberdayaan UMKM..... | 10 |
| F. Program Pengembangan UMKM..... | 11 |
| G. Program Perencanaan Tenaga Kerja | 11 |
| H. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja..... | 11 |
| I. Program Penempatan Tenaga Kerja..... | 12 |
| J. Program Hubungan Industrial. | 13 |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 24 |
| Faktor-Faktor Pendorong / Kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja..... | 25 |
| A. Faktor-Faktor Penghambat bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 25 |
| B. Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi | 26 |
| C. Kegiatan kegiatan yang mengalami Pergeseran Pagu Anggaran | 26 |
| BAB IV PENUTUP..... | 52 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen perubahan atas perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang telah dievaluasi sampai dengan periode Triwulan II (Dua) di mana isinya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD Perubahan.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Perubahan SKPD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan, dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke 2 (Dua) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 dimana Renstra tersebut tetap mengacu pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022, mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, begitu juga dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 4 Nomor 1 dimana keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Efektif dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 yaitu efektif berupa pencapaian hasil program dengan target dan pasal 4 ayat 5, efisien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau pengguna masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Setelah dilakukan analisa dan evaluasi capaian pada triwulan II (dua) tahun 2022 dan melalui proses perencanaan yang berjalan dengan memperhatikan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Berikut merupakan landasan hukum Penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

8. Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJM Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Walikota nomor 65 tahun 2018 Tentang Perubahan Renstra SKPD tahun 2016-2021; dan
10. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA SKPD

Adapun sistematika perubahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 serta target dan pendanaan untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Memuat bagian akhir dari Renja Perubahan Tahun 2022 yang juga memuat kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perubahan untuk Triwulan II (Dua) yang merupakan penjabaran Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku dan terwujud sinergitas antara Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kota Banjarmasin dengan RKPD Provinsi.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN**2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan**

Tahun 2022 merupakan tahun ke dua dalam periode Renstra Perubahan 2021-2026. Pada sub bab ini akan diuraikan analisa capaian pelaksanaan Renja untuk triwulan II Tahun 2022 untuk mengetahui progress capaian sasaran Renstra Tahun 2021-2026.

Analisa terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan perkantoran. Dengan tersedianya semua sarana dan prasarana perkantoran akan berdampak pada kinerja dan kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Pada anggaran perubahan, pagu anggaran sebesar Rp. 14.469.116.262,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.611.317.921,- (38,78%)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.499.000,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Rp.6.028.800,- dengan realisasi sebesar Rp.4.388.100,- (72,79%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Pagu anggaran Rp. 1.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Pagu anggaran Rp.1.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp0,- (0%).

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu anggaran Rp.1.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp.1.999.800,- (100%).
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Rp.11.470.800,- dengan realisasi sebesar Rp.979.500,- (8,54%).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.8.219.769.332
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 8.198.204.332 dengan realisasi sebesar Rp.3.831.515.436,- (46,74%).
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. .750.000 dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp.1.540.000 dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran Rp.1.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.249.000,- (24,90%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan pagu anggaran Rp.13.275.000 dengan realisasi sebesar Rp.513.500,- (3,87%)
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000.000,- terdiri dari :
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan pagu anggaran Rp.40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%).
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.576.501.800,- terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.556.900,- dengan realisasi Rp.3.200.000,- (48,80%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.556.900,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pagu anggaran Rp.73.640.700,- dengan realisasi Rp.48.412.000,- (65,74%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu anggaran Rp.111.827.300,- dengan realisasi Rp.43.260.400,- (38,69%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan pagu anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi Rp.2.490.000,- (16,60%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu anggaran Rp.1.199.000,- dengan realisasi Rp.255.000,- (21,27%).
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pagu anggaran Rp.9.999.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.500.000,- (15%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu anggaran Rp.347.927.700,- dengan realisasi Rp.88.173.846,- (25,34%)
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.4.729.694.800,- terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pagu anggaran Rp.25.306.000,- dengan realisasi Rp.18.312.000,- (72,36%).
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya pagu anggaran Rp.10.000.000,- dengan realisasi Rp.9.360.000,- (93,60%).
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp.4.199.999.800,- dengan realisasi Rp.1.201.963.487,- (28,62%)
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp.448.000.000,- dengan realisasi Rp.69.000.000,- (15,40%)
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.492.537.830,- terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik pagu anggaran Rp.191.142.850,- dengan realisasi Rp.75.640.740,- (39,57%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu anggaran Rp.301.394.980,- dengan realisasi Rp.141.460.920,- (46,94%)
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran Rp.384.113.500,- terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu anggaran Rp.146.233.700,- dengan realisasi Rp.53.607.192,- (36,66%).
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran Rp.47.880.000,- dengan realisasi Rp.15.037.000,- (31,41%).
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp.180.000.000,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp.9.999.800,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).

B. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Bimtek Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Bimtek Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Bimtek Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Bimtek Pelaksanaan RAT Koperasi dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.343.894.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.92.654.400,- (26,94%).

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota pagu anggaran Rp.343.894.900,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.343.894.900,- dengan realisasi Rp.92.654.400,- (26,94%).

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Pelatihan Pemasaran Secara online bagi UMKM yang menjadi Anggota Koperasi, Pelatihan Akuntansi Koperasi dengan Sistem Komputerisasi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Angkatan ke-1, Pelatihan Digitalisasi Usaha UMKM yang menjadi Anggota Koperasi Angkatan ke-1, Pelatihan Akuntansi Koperasi dengan Sistem Komputerisasi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Angkatan ke-2. Pelatihan Akuntansi Koperasi dengan Sistem Komputerisasi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Angkatan ke-3 dan Pelatihan Pemasaran secara online bagi Produk UMKM Angkatan ke-1 dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.638.970.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.266.684.550,- (41,74%).

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi :

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.638.970.000,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pagu anggaran Rp.638.970.000,- dengan realisasi Rp.266.684.550,- (41,74%).

D. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Sosialisasi Fasilitasi Permodalan dan Bimtek Penyusunan Proposal bantuan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.46.185.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.30.789.700,- (66,67%).

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.46.185.000,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.46.185.000,- dengan realisasi Rp.30.789.700,- (66,67%).

E. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Pelatihan WUB Sasirangan, Pelatihan WUB Menjahi, kegiatan Workshop Profil Bisnis, Pelatihan Digital Marketing, Pekan Raya Banjarmasin, kegiatan Sosialisasi Perizinan, kegiatan jaringan kemitraan dan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.001.570.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.391.183.400,- (39,06%).

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) meliputi :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan pagu anggaran Rp.1.001.570.300,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro pagu anggaran Rp.48.440.000,- dengan realisasi Rp.31.079.000,- (64,16%).
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pagu anggaran Rp.42.409.800,- dengan realisasi Rp.12.128.800,- (28,60%).
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pagu anggaran Rp.910.720.500,- dengan realisasi Rp.347.975.600,- (38,21%).

F. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Pameran Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF), Pameran Pekan Raya Banjarmasin (PRB) pagu anggaran sebesar Rp.648.763.220,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.142.767.880,- (22,01%).

Program Pengembangan UMKM meliputi :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil pagu anggaran Rp.648.763.220,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi pagu anggaran Rp.648.763.220,- dengan realisasi Rp.142.767.880,- (22,01%).

G. Program Perencanaan Tenaga Kerja meliputi:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) pagu anggaran Rp. 14.119.600,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro pagu anggaran Rp. 14.119.600,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).

H. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Pelatihan Menjahit, Pelatihan Komputer, Pelatihan Service Sepeda Motor, Pelatihan Kewirausahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.536.302.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.256.392.910,- (47,81%)

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi pagu anggaran Rp.439.440.000,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pagu anggaran Rp.439.440.000,- dengan realisasi Rp.208.480.310,- (47,44%).
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pagu anggaran Rp.47.912.600,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pagu anggaran Rp.47.912.600,- dengan realisasi Rp.47.912.600,- (100%).

3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.48.950.000,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja pagu anggaran Rp.48.950.000,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).

I. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, Pemagangan Dalam Negeri, Pelatihan Barbershop, cetak buku Laporan IPK, cetak kartu AK-1, acara Job Fair dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.461.599.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.59.035.000,- (12,79%).

Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.192.239.900 terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja pagu anggaran Rp.8.950.000,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja pagu anggaran Rp.23.210.000,- dengan realisasi Rp.23.210.000,-(100%).
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pagu anggaran Rp.160.079.900,- dengan realisasi Rp.28.704.000,-(17,93%).
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja pagu anggaran Rp.269.359.800,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online pagu anggaran Rp.97.800.000,- dengan realisasi Rp.7.121.000,- (7,28%).
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa kerja pada awal tahun dianggarkan sebesar Rp.171.559.800 dengan realisasi Rp.0,- (0%) namun dikarenakan kondisi masih pandemi maka di anggaran perubahan dana dialihkan utk kegiatan lainnya dan kegiatan Job Fair/bursa kerja tidak dilaksanakan.

J. Program Hubungan Industrial

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Bimtek Tata Cara Penyusunan PP/PKB, Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Sosialisasi Tata Cara penyelesaian PHI/PHK di luar pengadilan melalui mediasi, Penyelesaian Perselisihan HI PT Wilson Lautan

Karet, Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja, Rapat Dewan Pengupahan. Sosialisasi UMK Rapat LKS Tripartit dan Verifikasi SP/SB dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.276.049.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.826.400,- (41,96%).

Program Hubungan Industrial meliputi :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.173.684.700,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan pagu anggaran Rp.34.804.100,- dengan realisasi Rp.33.072.000,- (95,02%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan pagu anggaran Rp.138.880.600,- dengan realisasi Rp.75.002.400,- (54%).
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.102.364.300,- terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.29.124.600,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi pagu anggaran Rp.2.124.900,- dengan realisasi Rp.0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp.71.114.800,- dengan realisasi Rp.7.752.000,- (9,91%).



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

Adapun evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan II Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Periode Pelaksanaan Tahun 2021 – 2026 tergambar dalam tabel E.81 berikut ini:

Tabel E.81

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan II Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
Periode Pelaksanaan 2021 – 2026 (n = 2022)**

| Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra PD Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2021) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2022) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021 (%) | | Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab | |
|---|--|---|---------------------------------|---------|---|------|---|------------|------------------------------------|----|-------------|------|------------|------|------------|----|---|------|--|------------|---|--------|--|--|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5x100% | | 15 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT | 4,87 | % | 361.894.900 | 63,4 | % | 85.779.000 | 4,87 | % | 361.894.900 | 1 | 26.013.600 | 3,84 | 66.640.800 | | | 4,84 | 92.654.400 | 68,24 | 178.433.400 | 1401 | 49,31 | |
| | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku | 9,74 | % | 361.894.900 | 63,4 | % | 85.779.000 | 9,74 | % | 361.894.900 | 2,35 | 26.013.600 | 2,55 | 66.640.800 | | | 4,9 | 92.654.400 | 68,3 | 178.433.400 | 701 | 49,31 | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Koperasi yang termutakhirkan Data dan Keragaannya | 3 | Dokumen | 22.000.000 | 3 | Dokumen | 22.000.000 | | | | | | | | | 0 | - | 3 | 22.000.000 | 100 | 100,00 | | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|-------|-------------|---------------|------|----------|---------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|--|--|------|-------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| | | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi yang berkembang usahanya | 24,35 | % | 46.185.000 | 70 | % | 31.374.000 | 8,12 | % | 46.185.000 | 2,71 | 15.394.850 | 2,71 | 15.394.850 | | | | 5,42 | 30.789.700 | 75,42 | 62.163.700 | 310 | 134,60 | |
| | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi | 90 | koperasi | 46.185.000 | 90 | Koperasi | 31.374.000 | 90 | Koperasi | 46.185.000 | 30 | 15.394.850 | 30 | 15.394.850 | | | | 60 | 30.789.700 | 150 | 15.394.850 | 167 | 33,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,67 | 33,33 | | |
| | Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil | 0,5 | % | 949.140.250 | 3,27 | % | 1.055.329.208 | 0,50 | % | 911.494.400 | 0,03 | 121.694.075 | 0,24 | 269.489.325 | | | | 0,27 | 391.183.400 | 3,54 | 1.446.512.608 | 708 | 152,40 | |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya | 496 | Usaha Mikro | 8.281.527.750 | 3,27 | % | 1.055.329.208 | 176 | Usaha Mikro | 911.494.400 | 10 | 121.694.075 | 86 | 269.489.325 | | | | 96 | 391.183.400 | 99,27 | 1.446.512.608 | 20 | 17,47 | |
| | | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang bermitra | 80 | Usaha Mikro | 48.440.000 | 50 | umkm | 182.220.000 | 80 | Usaha Mikro | 48.440.000 | 30 | 31.079.000 | 0 | - | | | | 30 | 31.079.000 | 80 | 213.299.000 | 100 | 440,34 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|-------|-------------|---------------|-----|------|-------------|--------|-------------|-------------|----|------------|------|-------------|--|--|------|-------------|-------|---------------|--------|--------|--|
| | | Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya | 140 | Usaha Mikro | 42.409.800 | | | | 140 | Usaha Mikro | 42.409.800 | 0 | - | 30 | 12.128.800 | | | 30 | 12.128.800 | 30 | 12.128.800 | 21 | 28,60 | |
| | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro | 240 | Usaha Mikro | 820.844.800 | 100 | umkm | 873.109.208 | 240 | Usaha Mikro | 820.844.800 | 40 | 90.615.075 | 110 | 257.360.525 | | | 150 | 347.975.600 | 250 | 1.221.084.808 | 104 | 148,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,20 | 205,91 | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil | 0,5 | % | 1.093.979.000 | 50 | % | 188.828.000 | 0,5 | % | 974.093.920 | | 46.313.640 | 0,04 | 96.454.240 | | | 0,04 | 142.767.880 | 50,04 | 331.595.880 | 10008 | 30,31 | |
| | | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Meningkatnya orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil | 176 | Usaha Mikro | 1.093.979.000 | 50 | % | 188.828.000 | 176 | Usaha Mikro | 974.093.920 | | 46.313.640 | 15 | 96.454.240 | | | 15 | 142.767.880 | 65 | 331.595.880 | 37 | 30,31 | |
| | | Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta, Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 35320 | Usaha Mikro | 1.093.979.000 | 300 | umkm | 188.828.000 | 35.320 | Usaha Mikro | 974.093.920 | | 46.313.640 | 30 | 96.454.240 | | | 30 | 142.767.880 | 330 | 331.595.880 | 0,93 | 30,31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,93 | 30,31 | | |
| Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Tenaga Kerja | 100 | % | 100.000.000 | | | | | 100 | % | 97.119.600 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| | Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja | 100 | % | 100.000.000 | | | 100 | % | 97.119.600 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1,00 | Dokumen | 100.000.000 | | | 1 | dokumen | 97.119.600 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 22,40 | % | 548.000.000 | 50 | % | 248.274.100 | 22,40 | % | 542.340.000 | 11,2 | 115.676.685 | 5,6 | 140.716.225 | | 16,8 | 256.392.910 | 66,8 | 504.667.010 | 298 | 92,09 | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi | Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja | 50 | % | 443.000.000 | 50 | % | 213.069.100 | 50 | % | 439.440.000 | 20 | 115.676.685 | 15 | 92.803.625 | | 35 | 208.480.310 | 85 | 421.549.410 | 170 | 95,16 | |
| | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri | 48 | Org | 443.000.000 | 32 | Org | 213.069.100 | 48 | Org | 443.000.000 | 16 | 115.676.685 | 16 | 92.803.625 | | 32 | 208.480.310 | 64 | 421.549.410 | 133 | 95,16 | |
| | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi | 100 | % | 55.000.000 | 50 | % | 35.205.000 | 100 | % | 53.950.000 | | - | 50 | 47.912.600 | | 50 | 47.912.600 | 100 | 83.117.600 | 100 | 151,12 | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek | 20 | LPKS | 55.000.000 | 20 | LPKS | 35.205.000 | 100 | % | 53.950.000 | | - | 20 | 47.912.600 | | 20 | 47.912.600 | 40 | 83.117.600 | 200 | 151,12 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|-------------|------|-----|---------------|-----|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|--|-------|------------|-------|---------------|--------|--------|--|
| | Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja | 50 | % | 297.345.000 | | | | 50 | % | 48.950.000 | | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya | 20 | Orang | 297.345.000 | | | | 20 | Orang | 48.950.000 | | | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111,11 | 82,09 | |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan | 18 | % | 486.040.000 | 7,94 | % | 1.959.370.000 | 18 | % | 474.939.700 | 2,03 | 25.303.600 | 5,15 | 33.731.400 | | 7,18 | 59.035.000 | 15,12 | 2.018.405.000 | 84 | 415,28 | |
| | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencari kerja yang memahami Penempatan Tenaga Kerja | 100 | % | 215.240.000 | 7,94 | % | 190.088.000 | 100 | % | 205.579.900 | 11,29 | 23.210.000 | 28,62 | 28.704.000 | | 39,91 | 51.914.000 | 47,85 | 242.002.000 | 48 | 112,43 | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja | Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa kerja Khusus (BKK) | 15 | SMK | 10.000.000 | | | | 15 | SMK | 8.950.000 | | - | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah siswa yang memahami Bimbingan Jabatan Pencaker | 100 | Org | 36.000.000 | 20 | Org | 107.968.000 | 100 | Orang | 34.950.000 | 100 | 23.210.000 | - | | | 100 | 23.210.000 | 120 | 131.178.000 | 120 | 364,38 | |
| | Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan informal | 24 | org | 169.240.000 | 40 | Org | 82.120.000 | 24 | Orang | 161.679.900 | | - | 9 | 28.704.000 | | 9 | 28.704.000 | 49 | 110.824.000 | 204 | 65,48 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,06 | 143,29 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------|----------------|-------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|-------------|------|------------|------|------------|--|--|---|------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--|
| | | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor formal | 24,17 | % | 473.200.000 | 15,89 | % | 53.525.000 | 24,17 | % | 269.359.800 | 0,19 | 2.093.600 | 0,45 | 5.027.400 | | | | 0,64 | 7.121.000 | 16,53 | 60.646.000 | 68 | 12,82 | |
| | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Audit Sertifikasi Iso | 1 | Sertifikat ISO | 97.800.000 | 1 | Sertifikat ISO | 53.525.000 | 1 | Sertifikat ISO | 97.800.000 | 0 | 2.093.600 | 0 | 5.027.400 | | | | 0 | 7.121.000 | 1 | 60.646.000 | 100 | 62,01 | |
| | | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri | 515 | Org | 173.000.000 | | | | 515 | Org | 171.559.800 | | - | | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 31,01 | | |
| | Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus yang Diselesaikan | 100 | % | 597.075.000 | 60 | % | 77.980.750 | 100 | % | 297.473.900 | 25 | 33.072.000 | 25 | 82.754.400 | | | | 50 | 115.826.400 | 110 | 193.807.150 | 110 | 32,46 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---------|-------------|-----|---------------------------|------------|----|-----------------------|-------------|----|------------|----|------------|--|--|--|----|-------------|-----|-------------|-----|--------|--|
| | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 20 | % | 187.985.000 | 60 | % | 77.980.750 | 20 | % | 187.984.600 | 10 | 33.072.000 | 5 | 75.002.400 | | | | 15 | 108.074.400 | 75 | 186.055.150 | 375 | 98,97 | |
| | Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami pentingnya PP/PKB serta mengetahui bagaimana tata cara pembuatan PP/PKB | 65 | Pekerja | 39.450.000 | 40 | Pekerja/P erushaa n | 25.617.500 | 65 | Pekerja/P engusaha | 39.449.800 | 35 | 33.072.000 | 30 | - | | | | 65 | 33.072.000 | 105 | 58.689.500 | 162 | 148,77 | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan | Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami struktur skala upah dan Jaminan Sosial | 65 | Pekerja | 148.535.000 | 100 | Pekerja/P erushaa n | 51.363.250 | 65 | Pekerja | 148.534.800 | | - | 40 | 75.002.400 | | | | 40 | 75.002.400 | 140 | 126.365.650 | 215 | 85,07 | |
| | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pekerja/Pengusaha yang memahami perselisihan PHI/PHK | 85 | % | 109.490.000 | 60 | % | 40.415.500 | 85 | % | 109.489.300 | | - | 25 | 7.752.000 | | | | 25 | 7.752.000 | 85 | 48.167.500 | 100 | 43,99 | |

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|-------------------------------|------------|----|-------------------|------------|----|-------------------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------|--|
| | | Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja/Pengusaha yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI | 50 | Pekerja/Pengusaha | 29.125.000 | 40 | Pekerja/Pengusaha | 26.222.500 | 50 | Pekerja/Pengusaha | 29.124.800 | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 40 | 26.222.500 | 80 | 90,03 | |
| | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah terverifikasi | 10 | Serikat Pekerja/Serikat Buruh | 2.125.000 | 3 | Dokumen | | 10 | Serikat Pekerja/Serikat Buruh | 2.124.900 | - | 3 | - | | | 3 | - | 6 | - | 60 | 0,00 | | |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi bahan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan | 1 | Laporan | 78.240.000 | 1 | Laporan | 13.900.000 | 1 | Laporan | 78.239.800 | 0 | - | 0 | 7.752.000 | | 0 | 7.752.000 | 1 | 21.652.000 | 100 | 27,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123,38 | 70,31 | | |
| Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Terealisasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | % | 69.699.649.407 | | | | 100 | % | 4.199.999.800 | 0 | 99.401.390 | 0 | 1.102.562.097 | | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 1,72 | | | |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-------|---------------|--|--|--|-----|-------|---------------|---|-------------|---|---------------|--|--|---|---------------|---|---------------|--------|-------|--|
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | % | 4.199.999.800 | | | | 100 | % | 4.199.999.800 | 0 | 99.401.390 | 0 | 1.102.562.097 | | | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 28,62 | |
| | | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan yg bersifat dalam gedung | 2 | Paket | 4.199.999.800 | | | | 2 | Paket | 4.199.999.800 | 0 | 99.401.390 | 0 | 1.102.562.097 | | | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 1.201.963.487 | 0 | 28,62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 28,62 | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TAHUN 2022 | | | | | | | | | | | | 8.544.511.220 | | 531.284.440 | | | | | | 2.557.297.727 | | 6.660.299.285 | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (Program 1 s.d Program 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,73 | 73,60 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s.d Program 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sedang | | |

Disusun,

Banjarmasin, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja


 H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE., M. AP.
 NIP. 19680111993031006

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 55 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja maka dijelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ialah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Bidang Tenaga Kerja.

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam membangun Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Isu-isu Strategis sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ialah :

1. Meningkatkan peran serta koperasi;
2. Menghimpun dan memberikan pengetahuan para pelaku Usaha Mikro;
3. Menumbuhkembangkan jiwa dan mental kewirausahaan;
4. Memberikan keahlian pencari kerja untuk memasuki dunia kerja dari struktur formal dan informal, dan menempatkan tenaga kerja melalui bursa kerja; dan
5. Memberikan pelayanan, pembinaan kepada pekerja, pengusaha, dan Lembaga Ketenagakerjaan;

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ada beberapa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. antara lain :

- A. Faktor-faktor pendorong / kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam mencapai tujuan, yaitu :
 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam

- melaksanakan sistem dan mekanisme sesuai tupoksi;
2. Struktur organisasi yang sesuai dengan eksistensi koperasi, usaha mikro, dan ketenagakerjaan;
 3. Adanya dukungan kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah;
 4. Potensi Daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian, usaha mikro dan ketenagakerjaan;
 5. Adanya fasilitasi permodalan dari lembaga/instansi terkait kepada Koperasi dan UMKM; dan
 6. Banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM;
- B. Faktor-Faktor penghambat bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuannya adalah :
1. Kurangnya Pengembangan dan Penataan Organisasi, Tatalaksana, dan Badan Hukum Koperasi;
 2. Kurangnya pengawasan dan pengendalian Monitoring dan Evaluasi serta tidak terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi, pendampingan usaha mikro dan pembinaan pasca pelatihan;
 3. Kurangnya pembinaan dan pembimbingan ke wirausahaan (para pelaku usaha mikro dan para wirausaha baru);
 4. Kurangnya petugas atau pegawai untuk pendataan data-data yang berhubungan Usaha Mikro di lapangan;
 5. Kurangnya Sarana dan Prasarana, kurangnya tenaga instruktur, belum adanya rekrutmen Pegawai Fungsional Pengantar Kerja;
 6. Kurangnya pembinaan dan penyiapan pencari kerja sesuai dengan kemajuan industri;
 7. Kurangnya pegawai teknis Hubungan Industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada;
 8. Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi; dan
 9. Terjadinya pandemi (wabah Covid-19) yang mana Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota dengan status zona merah berulang untuk kasus Positif Covid-19 di Indonesia.

C. Faktor-Faktor Internal yang mempengaruhi antara lain :

1. Adanya aspek pemerataan yang diprioritaskan oleh Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder;
3. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi; dan
4. Kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi.

Pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Renja Perubahan SKPD tahun 2022 Dinas Koperasi dan UMKM telah merencanakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.436.570.582,- (Delapan belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Pada tahun 2022 anggaran murni sebesar Rp.18.507.588.745,- (Delapan belas miliar lima ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) mengalami perubahan pagu anggaran.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini ada 18 (delapan belas) sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran pagu anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2022 antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terletak pada sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.36.000.000,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.40.000.000,- (Bertambah Rp.4.000.000,- untuk pengadaan Baju Adat Kepala Dinas pada hari jadi Kota Banjarmasin).
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.379.814.100,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.576.501.800,- ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp.196.687.700 terletak pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.347.927.700,- (Penambahan Pagu sebesar Rp.196.687.700,- untuk mendukung perjalanan Dinas Studi Tiru Inkubator Bisnis, audience inkubator Bisnis ke kementerian, Pemantapan Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro ke kementerian dan lain-lain sesuai kebutuhan).

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.4.683.305.800,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.4.729.694.800, - Ada penambahan sebesar Rp.46.389.000,- terletak pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.46.389.000,- (Penambahan anggaran sebesar Rp.46.389.000,- untuk pengadaan laptop untuk peralatan kerja Pejabat Baru terisi).
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.487.537.830,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.492.537.830,- Ada penambahan sebesar Rp.5.000.000,- terletak pada sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.191.142.850,- (Penambahan Anggaran Rp.5.000.000,- untuk mencukupi kebutuhan listrik di Gedung RSK).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.259.133.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.384.113.500,-. Ada penambahan sebesar Rp.7.499.900,- terletak pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.146.233.700,- (Bertambah Pagu Rp.7.499.900,- untuk pemeliharaan/suku cadang kendaraan Roda 4 Eselon III).
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.259.133.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.384.113.500,- Ada penambahan sebesar Rp.8.120.000,- terletak pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.47.880.000,- (Penambahan dana sebesar Rp.8.120.000,- untuk pemeliharaan saran kantor, Personal Komputer. Laptop. Notebook dan Printer).
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.259.133.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.384.113.500,- terletak pada Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.180.000.000,- ada penambahan dana sebesar Rp.128.960.200,- (Bertambah sebesar Rp.128.960.000,- untuk pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menyesuaikan kebutuhan).
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.259.133.600,- pada pagu anggaran perubahan

sebesar Rp.384.113.500,- terletak pada Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.9.999.800,- ada pengurangan dana sebesar Rp.19.600.200,- (Efisiensi Anggaran sebesar Rp.19.600.200,- karena realisasi sesuai kebutuhan).

9. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.361.894.900,-, pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.343.894.900,- terletak pada sub kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.343.894.900,- (Pengurangan pagu sebesar Rp.18.000.000,- dikarenakan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi triwulan I dan II tidak dapat dilaksanakan karena keluarnya peraturan baru Nomor 15 Tahun 2021 pada bulan Juli tentang pedoman kertas kerja penilaian kesehatan simpan pinjam yang baru sehingga peraturan yang lama tidak berlaku lagi).
10. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.911.494.400,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.1.001.570.300,- terletak pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.910.720.500,- Ada penambahan pagu sebesar Rp.90.075.900,- (dikarenakan anggaran untuk studi banding luar daerah Rp.90.075.900,- Tim Pengelola kegiatan Inkubator Bisnis dengan mengikutsertakan peserta yang lulus pada tahap inkubasi Utama (10 Peserta). Hal ini berdasarkan dari Program Kerja yang ada di kurikulum kegiatan dalam upaya memaksimal hasil capaian program).
11. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.974.093.920,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.648.763.220,- . Ada pengurangan anggaran sebesar Rp.325.330.700,- terletak pada sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi pada anggaran perubahan pagu sebesar Rp.648.783.220,- (Pergeseran Anggaran sebesar Rp.325.330.700,- karena kegiatan Pendataan Usaha Mikro tidak

dapat digunakan karena kegiatan terfasilitasi dari anggaran APBN Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia).

12. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.97.119.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.14.119.600,-. Ada pengurangan sebesar Rp.83.000.000,- terletak pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 14.119.600,-. Ada pengurangan pagu sebesar Rp.83.000.000,- (Dikarenakan Pengurangan Anggaran sebesar Rp.83.000.000,- pada belanja jasa konsultan Non Konstruksi karena adanya asistensi penyusunan Dokumen RTK Makro oleh Provinsi).
13. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.53.950.000,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.47.912.600,-. Ada pengurangan sebesar Rp.6.037.400,- (Efisiensi Anggaran sebesar Rp.6.037.400,- Pada Honorarium dan Jasa Kebersihan).
14. Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota awal tahun sebesar Rp.205.579.900,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.192.239.900,-. Ada pengurangan sebesar Rp.11.470.000,- terletak pada sub kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja pada pagu perubahan sebesar Rp.23.210.000,- ada pengurangan pagu sebesar Rp.11.740.000,- (Dikarenakan Efisiensi sebesar Rp.11.470.000,- pada honorarium Narasumber dan Jasa Kebersihan dan Fotocopy).
15. Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota awal tahun sebesar Rp.205.579.900,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.192.239.900,-. Ada pengurangan sebesar Rp.1.600.000,- terletak pada sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pada pagu perubahan sebesar Rp.160.079.900,- ada pengurangan pagu sebesar Rp.1.600.000,- (Dikarenakan Efisiensi sebesar Rp.1.600.000,- pada baju peserta pelatihan sasirangan).
16. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.187.984.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.173.684.700,- terletak pada sub kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan pada pagu anggaran perubahan Rp.34.804.100,- ada pengurangan pagu sebesar Rp.4.645.700,- (Dikarenakan ada Efisiensi Anggaran sebesar Rp.4.645.700,- pada rekening transport peserta seminar kit peserta)
17. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu

anggaran awal tahun sebesar Rp.187.984.600,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.173.684.700,- terletak pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan pada pagu anggaran perubahan Rp.138.880.600,- ada pengurangan pagu sebesar Rp.9.654.200,- (Dikarenakan ada Pengurangan anggaran Rp.9.654.200,- sisa perjalanan Dinas Non PNS masih akan dipergunakan anggota Tim Dewan Pengupahan melakukan Perjalanan Dinas Ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait penetapan UMK 2023.

18. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran awal tahun sebesar Rp.109.489.300,- pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp.102.364.300,- terletak pada Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota pada pagu anggaran perubahan Rp.71.114.800,- ada pengurangan pagu sebesar Rp.7.125.000,- (Dikarenakan ada pengurangan sebesar Rp.7.125.000,- pada rekening perjalanan dinas non PNS).

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja tergambar dalam Tabel TC.33 berikut ini :



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

Tabel TC. 33

Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022 (Sumber Dana : Semua)

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.17.0000 Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.7.0.00.17.0000 Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja Perubahan | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perubahan | Bertambah/ Berkurang | Catatan Penting |
|-----------------|---|---|------------------------|----------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 17 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 14.163.077.825 | 100% | 14.469.116.262 | 306.038.437 | |
| 2 17 01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 8.290.787.495 | 100% | 8.219.769.332 | (71.018.163) | |
| 2 17 01 2,02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan | 53 Orang | 8.269.222.495 | 53 Orang | 8.198.204.332 | (71.018.163) | |
| 2 17 01 2,02 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terfasilitasinya Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan | 12 Bulan | 5.750.000 | 12 Bulan | 5.750.000 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu | 1 Laporan | 1.540.000 | 1 Laporan | 1.540.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 06 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tanggapan Pemeriksaan | 1 Laporan | 1.000.000 | 1 Laporan | 1.000.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu | 4 laporan | 13.275.000 | 4 laporan | 13.275.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 23.499.000 | 100% | 23.499.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, IKU, RKT dan RKT Perubahan yg tersusun | 8 Dokumen | 6.028.800 | 8 Dokumen | 6.028.800 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 1 Dokumen | 1.999.800 | 1 Dokumen | 1.999.800 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 1 Dokumen | 1.999.800 | 1 Dokumen | 1.999.800 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan IKK | 2 Dokumen | 1.999.800 | 2 Dokumen | 1.999.800 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Evaluasi Renstra Renja dan RFK | 3 Laporan | 11.470.800 | 3 Laporan | 11.470.800 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik daerah | 100% | 3.000.000 | 100% | 3.000.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,03 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya dokumen RKBMD, RKBMD Perubahan, RKPBM, RKPBM Perubahan | 4 Dokumen | 3.000.000 | 4 Dokumen | 3.000.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 36.000.000 | 100% | 40.000.000 | 4.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah pakaian sasirangan yg di beli | 60 Stell | 36.000.000 | 60 Stell | 40.000.000 | 4.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi umum | 100% | 379.814.100 | 100% | 576.501.800 | 196.687.700 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pengadaan komponen instalasi listrik | 400 buah | 6.556.900 | 400 buah | 6.556.900 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 unit | 10.350.300 | 1 unit | 10.350.300 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga | 1000 Buah, 1 paket | 73.640.700 | 1000 Buah, 1 paket | 73.640.700 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Amplop Putih No..110 | 168 Kotak | 111.827.300 | 168 Kotak | 111.827.300 | 0,00 | |
| | | | | | | Lakban | 168 Buah | | 168 Buah | | - | |
| | | | | | | Isi Staples No..10 | 20 Buah | | 20 Buah | | - | |
| | | | | | | Ordner Folio | 420 Buah | | 420 Buah | | - | |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|--|-----------|--|---|--|
| | | | | | | Map Snellhecter | 840 Buah | | 840 Buah | | - | |
| | | | | | | Map plastik Pakai Jepit | 30 Buah | | 30 Buah | | - | |
| | | | | | | Double Folio 100 | 14 Buah | | 14 Buah | | - | |
| | | | | | | Buku Agenda Surat Keluar/Masuk | 15 Buah | | 15 Buah | | - | |
| | | | | | | Cutter L-500 | 168 Buah | | 168 Buah | | - | |
| | | | | | | Binder Clip 155 Width 32 mm | 168 Kotak | | 168 Kotak | | - | |
| | | | | | | Binder Clip 260 Width 51 mm | 168 Buah | | 168 Buah | | - | |
| | | | | | | Trigonal Clip No..3 | 140 Buah | | 140 Buah | | - | |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|-----------|--|---|--|
| | | | | | | Gunting Kertas Ukuran Sedang | 84 Pak | | 84 Pak | | - | |
| | | | | | | Isolasi Kecil | 249 Buah | | 249 Buah | | - | |
| | | | | | | Kertas Fax | 8 Pak | | 8 Pak | | - | |
| | | | | | | Kertas HVS A4 70 Gram | 170 Rim | | 170 Rim | | - | |
| | | | | | | Lem Cair | 252 Buah | | 252 Buah | | - | |
| | | | | | | Lem Stik 21 gram | 420 Buah | | 420 Buah | | - | |
| | | | | | | Map Batik Ukuran Folio, Motif Batik, 650 gram | 84 Pak | | 84 Pak | | - | |
| | | | | | | Penggaris Besi | 168 Kotak | | 168 Kotak | | - | |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|-----------|--|---|--|
| | | | | | Pensil | 420 Buah | | 420 Buah | | - | |
| | | | | | Penghapus Papan Tulis | 10 Pak | | 10 Pak | | - | |
| | | | | | Penghapus Pulpen | 168 Buah | | 168 Buah | | - | |
| | | | | | Pita Fax | 4 Buah | | 4 Buah | | - | |
| | | | | | Pulpen Biasa | 500 Buah | | 500 Buah | | - | |
| | | | | | Balliner | 300 Buah | | 300 Buah | | - | |
| | | | | | Spidol White Board | 420 Buah | | 420 Buah | | - | |
| | | | | | Spidol Permanen | 110 Buah | | 110 Buah | | - | |
| | | | | | Stabilo | 170 Kotak | | 170 Kotak | | - | |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|---|--|
| | | | | | | Staples No.10 | 20 Buah | | 20 Buah | | - | |
| | | | | | | Stempel Dinas | 5 Pak | | 5 Pak | | - | |
| | | | | | | Bak Stempel | 20 Buah | | 20 Buah | | - | |
| | | | | | | Post-it 653 (Size 34,9 x 47,66 mm) | 168 Buah | | 168 Buah | | - | |
| | | | | | | Post-it 653 (Size 47,6 x 73 mm) | 84 Buah | | 84 Buah | | - | |
| | | | | | | Tempat Isolasi | 14 Buah | | 14 Buah | | - | |
| | | | | | | Amplop Putih No.90 | 168 Kotak | | 168 Kotak | | - | |
| | | | | | | Kertas HVS F4 / Folio 70 Gram | 381 Rim | | 381 Rim | | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------|--|
| | | | | | | Kertas HVS F4 / Folio 70 Gram | 381 Rim | | 381 Rim | | - | |
| | | | | | | Map Biasa | 170 Pak | | 170 Pak | | - | |
| | | | | | | Pelubang Kertas | 30 Buah | | 30 Buah | | - | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Amplop SKPD | 15 Kotak | 15.000.000 | 15 Kotak | 15.000.000 | 0,00 | |
| | | | | | | Map SKPD | 500 Lembar | | 500 Lembar | | - | |
| | | | | | | Blanko Disposisi | 60 buku | | 60 buku | | - | |
| | | | | | | Spanduk | 20 Meter | | 20 Meter | | - | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Koran | 200 Eksemplar | 1.199.000 | 200 Eksemplar | 1.199.000 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kunjungan yg terfasilitasi | 25 kali | 9.999.900 | 25 kali | 9.999.900 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1 laporan | 151.240.000 | 1 laporan | 347.927.700 | 196.687.700 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 4.683.305.800 | 100% | 4.729.694.800 | 46.389.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan meubel | 1 unit | 25.306.000 | 1 unit | 25.306.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pengadaan dan peralatan mesin lainnya | 1 Paket | - | 1 Paket | 46.389.000 | 46.389.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 07 | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah pengadaan aset tetap lainnya | 1 unit | 10.000.000 | 1 unit | 10.000.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 09 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan yg bersifat dalam gedung | 2 Paket | 4.199.999.800 | 2 Paket | 4.199.999.800 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan yg bersifat dalam gedung | 1 Paket | - | 1 Paket | | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 11 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 paket | 448.000.000 | 1 paket | 448.000.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 487.537.830 | 100% | 492.537.830 | 5.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa telpon, internet, air dan listrik | 12 Bulan | 186.142.850 | 12 Bulan | 191.142.850 | 5.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran jasa tenaga honorer/ pegawai kontrak | 12 bulan | 301.394.980 | 12 bulan | 301.394.980 | 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 259.133.600 | 100% | 384.113.500 | 124.979.900 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------|-------------|----------|-------------|---------------------|--|
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya | 16 Unit | 138.733.800 | 16 Unit | 146.233.700 | 7.499.900 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara | 111 unit | 39.760.000 | 111 unit | 47.880.000 | 8.120.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara/rehabilitasi yg bersifat dalam gedung | 3 Gedung | 51.039.800 | 3 Gedung | 180.000.000 | 128.960.200 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi yg bersifat luar gedung | 3 Gedung | 29.600.000 | 3 Gedung | 9.999.800 | (19.600.200) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT | 4,87% | 361.894.900 | 4,87% | 343.894.900 | (18.000.000) | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | .Persentase Meningkatnya Koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku | 9,74% | 361.894.900 | 9,74% | 343.894.900 | (18.000.000) | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan koperasi | 90 Koperasi | 361.894.900 | 90 Koperasi | 343.894.900 | (18.000.000) | |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi Aktif | 3,25% | 638.970.000 | 3,25% | 638.970.000 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 05 | 2,01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi | 12,99% | 638.970.000 | 12,99% | 638.970.000 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 2 | 17 | 05 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM Koperasi/Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 210 Orang | 638.970.000 | 210 Orang | 638.970.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang mengelola Usahanya secara profesional | 6,49% | 46.185.000 | 6,49% | 46.185.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi yang berkembang usahanya | 8,12% | 46.185.000 | 8,12% | 46.185.000 | 0,00 |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi | 90 Koperasi | 46.185.000 | 90 Koperasi | 46.185.000 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil | 0,5% | 911.494.400 | 0,5% | 1.001.570.300 | 90.075.900 | |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya | 176 Usaha Mikro | 911.494.400 | 176 Usaha Mikro | 1.001.570.300 | 90.075.900 | |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang bermitra | 80 Usaha Mikro | 48.440.000 | 80 Usaha Mikro | 48.440.000 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya | 140 Usaha Mikro | 42.409.800 | 140 Usaha Mikro | 42.409.800 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 04 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro | 240 Usaha Mikro | 820.644.600 | 240 Usaha Mikro | 910.720.500 | 90.075.900 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil | 0,5% | 974.093.920 | 0,5% | 648.763.220 | (325.330.700) | |
| 2 | 17 | 08 | 2,01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Meningkatnya orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil | 176 Usaha Mikro | 974.093.920 | 176 Usaha Mikro | 648.763.220 | (325.330.700) | |
| 2 | 17 | 08 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | 35,350 Usaha Mikro | 974.093.920 | 35,350 Usaha Mikro | 648.763.220 | (325.330.700) | |
| 2 | 07 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Tenaga Kerja | 100% | 97.119.600 | 100% | 14.119.600 | (83.000.000) | |
| 2 | 07 | 02 | 2,01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja | 100% | 97.119.600 | 100% | 14.119.600 | (83.000.000) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 07 | 02 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 dokumen | 97.119.600 | 1 dokumen | 14.119.600 | (83.000.000) |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 22,40% | 542.340.000 | 22,40% | 536.302.600 | (6.037.400) |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja | 50% | 439.440.000 | 50% | 439.440.000 | 0,00 |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri | 48 org | 439.440.000 | 48 org | 439.440.000 | 0,00 |
| 2 | 07 | 03 | 2,02 | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi | 100% | 53.950.000 | 100% | 47.912.600 | (6.037.400) |
| 2 | 07 | 03 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek | 20 LPKS | 53.950.000 | 20 LPKS | 47.912.600 | (6.037.400) |
| 2 | 07 | 03 | 2,05 | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja | 50% | 48.950.000 | 50% | 48.950.000 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 07 | 03 | 2,05 | 01 | Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya | 20 orang | 48.950.000 | 20 orang | 48.950.000 | 0,00 |
| 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan | 18% | 205.579.900 | 18% | 461.599.700 | 256.019.800 |
| 2 | 07 | 04 | 2,01 | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencari kerja yang memahami Penempatan Tenaga Kerja | 100% | 205.579.900 | 100% | 192.239.900 | (13.340.000) |
| 2 | 07 | 04 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja | Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa kerja Khusus (BKK) | 15 SMK | 8.950.000 | 15 SMK | 8.950.000 | 0,00 |
| 2 | 07 | 04 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah siswa yang memahami Bimbingan Jabatan Pencaker | 100 Orang | 34.950.000 | 100 Orang | 23.210.000 | (11.740.000) |
| 2 | 07 | 04 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan informal | 24 Orang | 161.679.900 | 24 Orang | 160.079.900 | (1.600.000) |
| 2 | 07 | 04 | 2,03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor formal | 24,17% | 269.359.800 | 24,17% | 269.359.800 | 0,00 |
| 2 | 07 | 04 | 2,03 | 02 | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Audit Sertifikasi Iso | 1 Sertifikat ISO | 97.800.000 | 1 Sertifikat ISO | 97.800.000 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 07 | 04 | 2,03 | 03 | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri | 515 Org | 171.559.800 | 515 Org | 171.559.800 | 0,00 |
| 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus yang Diselesaikan | 100% | 297.473.900 | 100% | 276.049.000 | (21.424.900) |
| 2 | 07 | 05 | 2,01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | 20% | 187.984.600 | 20% | 173.684.700 | (14.299.900) |
| 2 | 07 | 05 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami pentingnya PP/PKB serta mengetahui bagaimana tata cara pembuatan PP/PKB | 65 Pekerja/Pengusaha | 39.449.800 | 65 Pekerja/Pengusaha | 34.804.100 | (4.645.700) |
| 2 | 07 | 05 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami struktur skala upah dan Jaminan Sosial | 65 Pekerja | 148.534.800 | 65 Pekerja | 138.880.600 | (9.654.200) |



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|---|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pekerja/Pengusaha yang memahami perselisihan PHI/PHK | 85% | 109.489.300 | 85% | 102.364.300 | (7.125.000) | |
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja/Pengusaha yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI | 50 Pekerja/Pengusaha | 29.124.600 | 50 Pekerja/Pengusaha | 29.124.600 | 0,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah terverifikasi | 10 Serikat Pekerja/serikat buruh | 2.124.900 | 10 Serikat Pekerja/serikat buruh | 2.124.900 | 0,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 2,02 | 04 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi bahan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan | 1 Laporan | 78.239.800 | 1 Laporan | 71.114.800 | (7.125.000) | |
| Total | | | | | 10 Program, 21 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan | | | 18.507.589.245 | | 18.436.570.582 | (71.018.663) | |

Disusun,

Banjarmasin, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin



MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.AP.
NIP. 19680111 199303 1 006

BAB IV PENUTUP

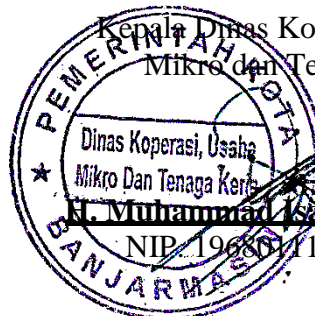
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ditentukan oleh dukungan dari seluruh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 serta pegawai dan pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan / sasaran yang diharapkan dan untuk mengetahui kearah mana guna mencapai keberhasilan menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja ditandai dengan target capaian kinerja dalam Tahun 2022 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Banjarmasin, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja



H. Muhammad Asri, SE. M.AP
NIP. 19680711 199303 1 006